

**Marginalisasi Peran Sosial Ekonomi Wanita
pada Masyarakat Desa Hutan
(Suatu Kajian Dampak dari Kerusakan Hutan terhadap Sistem Kehidupan Sosial
Ekonomi Masyarakat Desa Sekitar Hutan)**

Mulyaningrum
Dudi Rudianto
Adi Budi Priyanto

Universitas Bakrie

mulyaningrum@bakrie.ac.id
dudi.rudianto@bakrie.ac.id
adi.budipriyanto@bakrie.ac.id

Abstrak

Luas hutan di Indonesia menyusut setiap tahun yang mencapai lebih dari 2 juta hektar. Kementerian Kehutanan mencatat kerusakan hutan hingga 2009 mencapai lebih dari 1,08 juta hektar per tahun. Penyebab umum yang mempercepat kerusakan hutan antara lain illegal logging, pembalakan liar, kebakaran hutan, dan pemekaran wilayah investasi kelapa sawit dan pertambangan. Laju kerusakan hutan menimbulkan dampak yang luas terhadap sistem kehidupan sosial ekonomi masyarakat desa sekitar hutan. Mereka adalah golongan miskin yang lemah secara sosial-politik-ekonomi, dan telah diabaikan haknya dalam pemanfaatan dan pengelolaan hutan. Padahal, justru masyarakat desa hutan yang secara turun temurun telah mengelola hutan. Tulisan ini mengemukakan fakta dan analisa bahwa semakin banyaknya kerusakan hutan membawa konsekuensi buruk bagi kehidupan sosial ekonomi masyarakat desa sekitar hutan, khususnya kaum wanita. Mereka harus mengalami proses marginalisasi dalam peran sosial ekonominya, yang ditandai dengan semakin beratnya beban tugas wanita untuk memenuhi kebutuhan hidup yang menjadi semakin sulit. Kondisi tersebut tidak jarang menjadi penyebab hancurnya kehidupan hakiki kaum wanita pada masyarakat desa hutan.

Kata kunci: marginalisasi peran sosial ekonomi; masyarakat desa hutan; sistem kehidupan sosial ekonomi

1. Pendahuluan

Secara umum, kerusakan hutan akibat deforestasi maupun degradasi disebabkan oleh penebangan hutan untuk memenuhi permintaan kayu komersial yang semakin meningkat. Selain itu, perencanaan transmigrasi (*resettlement*), spekulasi tanah, konstruksi proyek skala besar, dan perluasan cabang-cabang usaha komersial, juga berpengaruh besar terhadap konversi hutan. Pada hakikatnya, kerusakan hutan yang semakin tinggi, lebih banyak disebabkan oleh perbedaan hak pengelolaan antar golongan dalam masyarakat. Golongan yang kuat secara sosial-politik-ekonomi, dapat mengeksploitasi hutan melalui konsesi Hak Pengusahaan Hutan (HPH).

Sementara itu, masyarakat desa di sekitar hutan yang masih sangat menggantungkan kepada hutan kurang mendapat perhatian akan hak-hak perikehidupan mereka oleh pemegang kendali pemerintahan. Secara kuantitas di seluruh dunia, jumlah masyarakat desa hutan lebih dari 200 juta orang, antara lain di hutan pedalaman Afrika, Asia dan Amerika Latin. Mereka adalah golongan miskin yang lemah secara sosial-politik-ekonomi, dan telah diabaikan haknya dalam pemanfaatan dan pengelolaan hutan. Padahal, justru masyarakat desa hutan yang secara turun temurun telah mengelola hutan dengan jaminan hak ulayat, meskipun tidak tertulis tetapi diakui dan dihormati keberadaannya oleh masyarakat. Hal ini mengakibatkan dampak pemerataan (*distributive impact*) yang timpang, Banyak keuntungan diraih oleh golongan kuat, sedangkan beban tanggungan harus dipikul oleh golongan masyarakat lemah yang miskin di sekitar hutan.

Untuk kasus Indonesia, semasa orde baru, pemerintahan lebih mengutamakan sentra-sentra pertumbuhan di pusat-pusat kota dan daerah-daerah satelit yang berada disekitarnya. Akibatnya, pembangunan tumbuh tidak merata dan desa hutan yang secara geografis berada jauh dari pusat pertumbuhan, kembali terabaikan, atau setidaknya berada dalam posisi yang belum tersentuh pembangunan. Pada era reformasi sampai saat ini, pemerintahan kembali disibukkan dengan upaya membenahi diri dari segala ketidaksesuaian yang dipandang sebagai penyebab krisis multi dimensi. Meskipun otonomi daerah telah dijalankan, paradigma lama konsep pembangunan masih sulit dirubah. Bagi daerah yang memiliki keterbatasan sumber dana dalam APBD, pemerintah cenderung bersikap seperti manajemen perusahaan, yaitu menciptakan pendapatan (PAD) sebesar-besarnya dan menekan pengeluaran sekecil-kecilnya. Pemerintah daerah tidak bersikap memihak pada kepentingan masyarakat secara luas, sehingga pos-pos biaya sosial dan pelayanan mendapat porsi yang kurang memadai.

Desa hutan yang karena kondisi geografis dan sosial ekonomi masyarakatnya jelas-jelas membutuhkan dana yang besar untuk mengejar ketertinggalannya, kembali terabaikan dan menjadi semakin jauh tertinggal dibandingkan daerah lain yang lebih dekat dengan pusat pemerintahan. Padahal, menurut data Kementerian Negara Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT, 2010; <http://www.lamongan.go.id>), besarnya persentase keluarga miskin yang tinggal di desa hutan lebih dari dua kali persentase keluarga miskin di Indonesia. Jumlah desa hutan ada 18.784 desa atau 26,6% dari jumlah seluruh desa di Indonesia, atau sebesar 58% dari desa tertinggal yang ada, yakni 32.379 desa. Jika lebih diperinci lagi, jumlah penduduk yang tinggal di desa hutan itu mencapai 33.512.845 jiwa. Dari jumlah

tersebut, yang memperoleh pendapatan seluruhnya dari kawasan hutan sebanyak 848.575 keluarga, 45% di antaranya masuk dalam kategori keluarga miskin. Jumlah keluarga yang sebagian besar memperoleh pendapatan dari kawasan hutan sebanyak 8.456.684 keluarga, dan 37.7 % di antaranya masuk kategori keluarga miskin.

Tulisan ini mengemukakan fakta dan analisa bahwa semakin banyaknya kerusakan hutan membawa konsekuensi buruk bagi kehidupan sosial ekonomi masyarakat desa sekitar hutan, khususnya kaum wanita. Mereka harus mengalami proses marginalisasi dalam peran sosial ekonominya, yang ditandai dengan semakin beratnya beban tugas wanita untuk memenuhi kebutuhan hidup yang menjadi semakin sulit. Kondisi tersebut tidak jarang menjadi penyebab hancurnya kehidupan hakiki kaum wanita pada masyarakat desa hutan.

2. Peran Sosial Ekonomi Wanita Desa Hutan

Dalam kajian ini, yang dimaksud dengan peran sosial ekonomi adalah semua aktivitas yang dilakukan sehubungan dengan posisi mereka dalam sistem masyarakat desa hutan, baik secara ekonomi yang menghasilkan barang-barang kebutuhan hidup, maupun secara sosial yang menghasilkan manfaat bagi seluruh anggota masyarakat. Peran sosial ekonomi wanita pada masyarakat desa hutan baik di Afrika, Asia dan Amerika Latin, secara umum mempunyai kesamaan antara lain terlihat pada sejumlah aktivitas yang sesuai dengan pembagian pekerjaan menurut jenis kelamin. Sebagai contoh, kaum wanita berperan sebagai pengelola rumah tangga, bertanggung jawab terhadap kesejahteraan seluruh anggota keluarga; menyiapkan semua kebutuhan seperti makanan, air, obat-obatan dan pakan ternak.

Untuk menjalankan peran ekonomi wanita pada masyarakat desa hutan, mereka sangat bergantung pada hutan. Hal ini dibuktikan dengan dimilikinya berbagai kemampuan para wanita dalam menyediakan seluruh kebutuhan hidup. Dari beberapa literatur disebutkan bahwa kaum wanita pada masyarakat desa hutan menghabiskan banyak waktu untuk melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepada mereka, dengan menjelajah hutan. Setiap hari mereka pergi ke hutan secara berkelompok dengan menempuh perjalanan kaki antara 8 sampai 10 kilometer dari rumah, untuk mengumpulkan kebutuhan pokok bagi keluarga (Combe, 1993).

Dalam memenuhi kebutuhan bahan bakar, wanita tidak menebang kayu, tetapi mengambil batang pohon mati yang telah tumbang. Hal ini untuk mendukung tetap terjaganya hutan dari kerusakan karena penebangan pohon. Menebang pohon selain menyulitkan, juga tidak efisien. Akan lebih mudah menggunakan kayu kering yang telah berjatuhan, lebih mudah membawanya, dan lebih cepat menyala dibandingkan kayu basah hasil tebangan. Oleh karena itu, tidak berdasar tuduhan bahwa penebangan pohon dan kerusakan hutan banyak disebabkan oleh penggunaan kayu bakar oleh kaum wanita. Di Tanzania, anak-anak masyarakat desa hutan, terutama yang wanita, sejak kecil sudah diajarkan untuk membantu ibunya mengumpulkan kayu bakar segera setelah mereka dapat berjalan.

Dalam peran sosialnya, kaum wanita pada masyarakat desa hutan bertugas sebagai dukun atau orang yang mampu menyembuhkan penyakit dengan ketrampilan yang dimiliki dalam meramu obat-obatan untuk kesehatan dari berbagai jenis umbi-umbian, kulit pohon dan dedaunan yang bisa ditemukan di hutan. Bagi kaum wanita, hutan dengan segala isinya berfungsi sebagai “*The Three F’s: fuel, food, fodder*” (Dankelman & Davidson, 1988). Dari pola kehidupan mereka, kaum wanita terbukti lebih mengenal ekosistem hutan dengan penggunaan sumberdaya dan pemeliharanya. Mereka juga sangat menikmati kebebasannya untuk bergerak dan mengatur lingkungan hidupnya dengan sangat cermat dan hati-hati.

Kerusakan hutan telah banyak merusak sistem nilai kehidupan masyarakat desa sekitar hutan dengan menyusupnya ide kapitalis. Selama berabad-abad masyarakat desa hutan di Afrika, Asia dan Amerika Latin, telah mempunyai pembagian kerja secara seksual (*sexual division of labour*). Pria bertugas berburu binatang dan menangkap ikan, sedangkan wanita bertugas mengumpulkan bahan makanan, kayu bakar, obat-obatan, bahan pakaian dan barang-barang kebutuhan rumah tangga seperti anyaman tikar, keranjang dan alat lainnya. Karena peran sosial-ekonominya yang sangat penting, wanita menggunakan sebagian besar kehidupannya untuk menjelajah hutan. Bagi wanita, hutan dan seisinya telah memberikan berbagai manfaat, sehingga menurut temuan Dakelman & Davidson (1988), kaum wanita di kalangan masyarakat desa hutan mampu mengenali 31 jenis pohon dan tumbuhan dengan semua sifat dan kegunaannya. Pria hanya berkepentingan terhadap beberapa jenis kayu hutan tertentu yang dianggap mempunyai nilai tukar tinggi, sehingga mereka hanya mampu mengenal 8 jenis pohon.

3. Kerusakan Hutan dan Perubahan Sistem Sosial Masyarakat Desa Hutan

Indonesia memiliki laju angka kerusakan hutan yang sangat tinggi setiap tahunnya, mencapai 1,08 juta hektar per tahun. Luas hutan di Indonesia menyusut setiap tahun. Kementerian Kehutanan mencatat kerusakan hutan hingga 2009 mencapai lebih dari 1,08 juta hektar per tahun. Hutan Indonesia dalam keadaan kritis, karena puluhan tahun menjadi andalan untuk pendapatan bagi negara. Dari 130 juta hanya 43 juta yang masuk dalam kategori hutan perawan. Hutan produksi yang dulu dikelola oleh HPH kini juga tersisa lebih kurang 48 juta dalam keadaan yang juga kritis, kemudian 40 juta kawasan hutan lainnya menghilang (<http://www.bunyu-online.com/2010/06/kerusakan-hutan-ancam-perekonomian.html>)

retrieved 14 juli 2010. Kalimantan merupakan salah satu daerah yang memiliki hutan alam terbesar. Pada tahun 2007, dalam buku laporan State of the World's Forests, FAO (Food and Agricultural Organization) menempatkan Indonesia di urutan ke-8 dari sepuluh negara dengan luas hutan alam terbesar di dunia. Tetapi laju kerusakan hutan di Indonesia mencapai 1,87 juta hektar dalam kurun waktu 2000 - 2005, mengakibatkan Indonesia menempati peringkat ke-2 dari sepuluh negara, dengan laju kerusakan tertinggi dunia.

Kerusakan hutan mengakibatkan terjadinya perubahan sistem sosial masyarakat desa hutan. Perubahan tersebut dimaksudkan untuk tujuan progresif memenuhi kebutuhan ekonomi dan sosial masyarakat. Perubahan sistem sosial akan menimbulkan ketidakstabilan atau kegoncangan atau ketidakberaturan (*randomness*), atau sering pula disebut *entropi*. Tingkat *entropi* yang rendah mencerminkan tingkat keteraturan yang tinggi. Setiap sistem kehidupan mempunyai kemampuan menghindari *entropi* maksimum dengan mengabsorbsi energi bebas di sekitarnya. Dalam sistem kehidupan *entropi* selalu menuju ke arah maksimum. Agar setiap sub sistem berfungsi sepenuhnya dalam upaya mencapai tujuan sosial, maka perlu ada koordinasi antar sub sistem dalam suatu organisasi atau sistem sosial.

Sistem sosial masyarakat desa hutan merupakan suatu organisasi yang terdiri dari berbagai bentuk kehidupan sebagai sub sistem yang berlainan, tetapi sangat erat hubungannya satu sama lainnya. Dengan cara tersebut masyarakat desa hutan mampu melewati kecenderungan dasar dari suatu sistem, yaitu ke arah tak beraturan atau *entropi*. Mekanisme yang sangat rapi dalam sistem sosial desa hutan telah memungkinkan sistem tersebut berkembang secara baik di antara sub-sub sistemnya secara terorganisir atau teratur. Namun

keadaan tersebut telah berubah. Perubahan sosial pada masyarakat desa hutan bersumber dari beberapa krisis, di antaranya berupa kerusakan atau gangguan terhadap kebiasaan atau pranata sosial yang sudah mapan (Mattulada, 1994). Mekanisme sistem sosial masyarakat desa hutan telah terganggu atau rusak karena aktivitas manusia lain di luar sistem desa hutan, yaitu dengan masuknya sistem Hak Pengelolaan Hutan (HPH). Manusia di luar sistem sosial masyarakat desa hutan telah menggantikan keteraturan dengan hal-hal atau alat yang mengakibatkan kekacauan atau *entropi*.

Aktivitas industri perkebunan telah mempercepat kecenderungan ke arah *entropi* tinggi. Dengan semakin naiknya penggunaan kayu hutan dan berkembangnya industri penggajian kayu dan pulp untuk kertas dan kayu lapis, maka semakin terasa kekurangan kayu untuk bahan mentah dan bahan pokok keperluan hidup. Kekurangan tersebut sangat terasa sejak terjadi Revolusi Industri. Akibatnya, setiap kegiatan yang berhubungan dengan penebangan kayu dan pemanfaatan hasil hutan lainnya, mulai mendapat perhatian dari pihak-pihak di luar masyarakat sekitar hutan.

Dengan munculnya sistem HPH, terjadi proses perubahan sistem sosial pada masyarakat desa hutan. Permulaan dari perubahan tersebut dapat ditelusur dari krisis dalam kehidupan kelompok masyarakat desa hutan. Adapun yang memancing timbulnya krisis itu adalah munculnya suatu peristiwa yang sangat jelas. Sebagai contoh adalah munculnya krisis berupa kemelaratan dan kesengsaraan yang dialami oleh kaum wanita pada masyarakat desa hutan, akibat masuknya sistem HPH. Hal ini menunjukkan adanya ketidak-teraturan pola hidup mereka, sehingga timbul kekacauan atau *entropi* yang tinggi dalam bentuk kemiskinan.

Adanya sistem HPH, kebebasan masyarakat desa hutan untuk memperoleh bahan kebutuhan hidup menjadi terbatas dan harus mencari ke tempat yang lebih jauh dari rumah tinggal mereka. Sungguhpun hal ini berarti semakin meluaskan habitat mereka, tetapi telah menimbulkan kesengsaraan serta ketidakteraturan perilaku sosial mereka. Di Afrika, Addis Ababa, Ethiopia, sekitar lebih dari 73.000 wanita dan anak-anak harus mengumpulkan kayu bakar dan bahan makanan secara sembunyi-sembunyi di hutan yang sudah dikuasai oleh pemegang HPH (Rodda, 1991). Kayu-kayu bakar terpaksa harus mereka jual ke kota yang jaraknya jauh, hanya untuk memperoleh bahan makanan yang semakin terasa mahal. Padahal semula, bahan makanan cukup banyak tersedia di hutan sekitar tempat tinggal mereka, dan mereka leluasa untuk mengambilnya.

Kekhawatiran yang mengancam kelestarian hutan menjadi semakin beralasan, mengingat bahwa fungsi hutan tidak hanya sebagai penghasil kayu dan memenuhi kebutuhan masyarakat di sekitarnya. Yang lebih penting adalah fungsi hutan sebagai perlindungan terhadap tata guna air dan tanah. Hal ini sudah bukan lagi hanya menyangkut kepentingan hidup masyarakat desa sekitar hutan, tetapi juga secara luas bagi tumbuhan dan hewan. Oleh karena itu, struktur relasi ekologis yang ada dalam sistem sosial masyarakat desa hutan menjadi terganggu oleh perubahan, baik dalam teknologi atau aspek lain, yaitu kebudayaan. Perubahan dalam aspek kebudayaan, biasanya berkelanjutan dengan perubahan aspek lainnya.

Sementara itu, dalam menghadapi perubahan sistem sosial tersebut, kaum pria masyarakat desa hutan dapat menjadi pekerja pada pengusaha HPH di penggergajian kayu, atau penambangan batubara di dekat hutan, atau bermigrasi ke kota. Akses yang dimiliki oleh kaum wanita untuk beradaptasi dengan perubahan sistem sosialnya lebih sedikit dibandingkan kaum pria. Walaupun wanita ikut bermigrasi ke kota, peluang kerjanya juga sangat terbatas. Cara hidup masyarakat desa hutan kemudian berubah untuk menerima atau menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungannya.

4. Marginalisasi Peran Sosial Ekonomi Wanita pada Masyarakat Desa Hutan

Dalam kajian ini, yang dimaksud dengan marginalisasi peran sosial ekonomi yang dialami oleh kaum wanita pada masyarakat desa hutan adalah suatu keadaan yang menempatkan wanita pada situasi dan kondisi yang semakin terpinggirkan atau tersisih dari keteraturan sistem masyarakatnya. Jika semula wanita mempunyai peran sosial dan ekonomi yang sangat penting dan dapat mendukung keteraturan dalam kehidupan masyarakatnya, maka karena terjadi perubahan dalam sistem sosial mereka akibat introduksi sistem dari luar, dan pada akhirnya peran sosial ekonomi wanita menjadi tersisih, menuju ketidak-beraturan hidup atau *entropi*.

Kegiatan penebangan hutan banyak disebabkan oleh keinginan pemerintah untuk memperoleh devisa tinggi, dengan penjualan kayu-kayu komersial. Di Sri Lanka (*Asian and Pasific Women's Resource and Action Series: Environment*, 1993), disebutkan bahwa penyebab kerusakan hutan yang dirasakan dampaknya bagi kehidupan wanita adalah program

pembangunan pemukiman (*resettlement*) serta proyek-proyek lain berskala besar. Kegiatan tersebut telah menimbulkan berbagai penderitaan kaum wanita, dan terjadilah proses marginalisasi karena sebab berikut:

- a) Pemberian kompensasi, uang ganti rugi atas lahan pertanian mereka, diserahkan kepada kaum pria, yang seringkali pemanfaatannya tidak bijaksana untuk kepentingan keluarga, tetapi untuk membeli tembakau dan kesenangan sendiri.
- b) Lokasi baru sangat jauh dari sumber air, dengan kondisi yang sangat asing bagi kaum wanita. Akibatnya, mereka mengalami keterbatasan dalam aktivitas pengumpulan bahan makanan, kayu bakar dan obata-obatan dan pekerjaan yang secara tradisional mereka lakukan.
- c) Lokasi pemukiman yang baru telah menghilangkan akses kaum wanita dalam peranannya di sektor pertanian.

Kebiasaan memanfaatkan dan konservasi hutan yang dulu dipraktikkan dalam kehidupan masyarakat desa hutan telah hilang bersama perubahan pola penggunaan hutan yang telah dialihkan kepada pemegang HPH. Padahal, kaum wanita pada masyarakat desa hutan merupakan kunci dalam menjaga ekosistem hutan. Pengetahuan dan pengalaman serta kedekatan mereka dengan hutan sebagai tempat tinggal yang dapat memenuhi aneka kebutuhan hidup mereka tidak diakui keberadaannya oleh sistem nilai baru. Paula William dari USAID, merupakan salah satu dari sembilan wanita yang menghadiri Konggres Kehutanan Sedunia IX di Mexico tahun 1985. Ia menyatakan bahwa memahami secara komprehensif interaksi yang terjadi antara kaum wanita dengan hutan, merupakan hal penting dalam pengelolaan sumberdaya hutan.

Semakin maraknya HPH telah ikut andil terhadap lenyapnya sistem sosial dalam pemanfaatan dan pemeliharaan hutan pada masyarakat desa hutan, yang dulunya lebih banyak dilakukan oleh kaum wanita. Sebagai gantinya, muncul sistem baru yang sangat asing bagi masyarakat desa sekitar hutan, misalnya dengan pertanian semi menetap. Ketika masyarakat desa sekitar hutan mulai mengenal pemeliharaan binatang ternak sebagai pelengkap kebutuhan makanan mereka, maka tanggung jawab pemeliharaan ternak tetap berada pada kaum wanita. Hal ini berarti kaum wanita pula yang harus mencari pakan ternak dan ini diperolehnya dari hutan. Demikian pula halnya dengan kebutuhan air, baik untuk kebutuhan minum rumah tangga, minum ternak mereka, bahkan sampai untuk pengairan pertanian pun dilakukan oleh kaum wanita.

Kebutuhan energi untuk rumah tangga (*domestic*) di sebagian besar negara dunia ketiga, seperti halnya di Pakistan, Somalia, Ethiopia, Muzambique, Tanzania dan Indonesia pada umumnya berasal dari kayu. Untuk dapat menyediakan makanan bagi keluarganya, wanita pada masyarakat desa hutan pun harus mencari kayu bakar. Mereka mengumpulkan ranting dan cabang pohon yang berserakan di hutan dan semak-semak. Untuk itu, kaum wanita juga harus membawa beban sekitar 35 kilogram dengan menempuh perjalanan lebih jauh lagi karena berkurangnya luasan hutan. Beban ini bukan tidak berpengaruh buruk terhadap kesehatan wanita.

Karena kelangkaan bahan bakar kayu, kaum wanita harus berjalan kaki tidak kurang dari 10 kilometer setiap harinya. Kegiatan mengumpulkan, memotong, mengangkut kayu bakar harus dilakukan rata-rata selama 8 jam per hari (Dakelman & Davidson, 1988). Keadaan tersebut telah menyebabkan perubahan dalam cara memasak makanan yang biasa dilakukan oleh kaum wanita. Kini, karena semakin mahalnya bahan bakar, mereka tidak dapat berlama-lama memasak hingga makanan menjadi benar-benar matang dan sehat untuk dikonsumsi. Kondisi tersebut tidak hanya berpengaruh negatif terhadap kesehatan kaum wanita itu sendiri, tetapi juga seluruh keluarganya.

Semakin terjadi kelangkaan kayu bakar menyebabkan mereka beralih ke limbah pertanian yang berupa jerami untuk dikonsumsi sendiri dalam memasak makanan, tetapi asap pembakaran jerami telah merusak kesehatan paru-paru sebagian besar kaum wanita. Kemudian muncul alternative penggunaan kotoran ternak sebagai pengganti kayu bakar. Kotoran ternak, mempunyai nilai yang lebih tinggi daripada jerami dijadikan, dapat dikumpulkan dan dijual ke kota (Braidotti; et al, 1994). Akibat pengumpulan jerami dan kotoran ternak sebagai pengganti bahan bakar kayu menimbulkan masalah lain, yaitu perubahan kualitas lahan. Secara umum, penggunaan kotoran ternak (*dung*) dan limbah pertanian sebagai bahan bakar telah ikut menjadi andil terhadap kerawanan lapisan tanah terhadap erosi dan penurunan kesuburannya.

Kerusakan hutan dan menurunnya kesuburan tanah telah menyebabkan semakin terbatasnya persediaan air yang berpengaruh terhadap hasil pertanian masyarakat desa hutan. Produksi pertanian yang menurun telah menambah kualitas kemiskinan, dan berarti semakin tinggi pula kesengsaraan hidup kaum wanita masyarakat desa hutan. Sementara itu, kaum pria yang tidak tahan menghadapi kemiskinan bermigrasi ke kota. Hal ini menyebabkan sebagian

besar kaum wanita menjadi kepala rumah tangga di desanya, dengan hanya mengandalkan penjualan kayu bakar untuk menghidupi anak-anak dan orang tua dalam keluarga mereka. Mahalnya bahan makanan mengakibatkan semakin buruknya kesehatan kaum wanita karena kebutuhan gizinya, tidak seimbangan dengan yang dimakan. Hal ini berkaitan dengan kebiasaan makan mereka, di mana mereka akan lebih mendahulukan suami, anak-anak, orang tua. Setelah itu semua, baru kemudian wanita makan. Padahal, pekerjaan sehari-hari kaum wanita yang cukup berat perlu didukung dengan masukan gizi yang baik.

5. Strategi Penting

Untuk kasus Indonesia, terdapat korelasi yang kuat antara prosentase jumlah desa hutan di suatu daerah dengan besaran angka kemiskinan dan nilai Indek Pembangunan Manusia (IPM). Hal tersebut menunjukkan bahwa desa hutan telah sejak lama menjadi kantong-kantong kemiskinan. Namun anehnya, upaya pengentasan kemiskinan yang tengah diupayakan pemerintah, baik pusat maupun daerah, seringkali tidak menyentuh komunitas masyarakat desa di sekitar hutan. Pemberdayaan masyarakat desa hutan secara holistik, belum dipandang sebagai sebuah bagian tidak terpisahkan dari pembangunan wilayah oleh banyak pihak pemerintah daerah.

Masyarakat desa hutan cenderung dipandang sebagai bagian dari program kehutanan dan oleh karenanya dianggap “urusan” Kementerian Kehutanan dan pengelola hutan negara. Untuk kasus di Pulau Jawa dan Madura, desa hutan lebih “dekat” dengan Perum Perhutani dalam artian yang salah kaprah dan salah arah. Maksudnya, proses pemberdayaan masyarakat dan pembangunan desa hutan, dipandang sebagai tugas dan tanggung jawab Perum Perhutani. Sementara Perum Perhutani dan komunitas kehutanan memandang bahwa desa hutan dan masyarakatnya tidak ada bedanya dengan desa-desa lainnya (kecuali secara geografis berada di sekitar kawasan hutan), yakni merupakan tanggung jawab pemerintah daerah. “Proses Pengabaian” itu, telah nyata-nyata membentuk masyarakat desa hutan sebagai komunitas masyarakat sipil yang “lemah secara ekonomi dan lemah pula secara politik”. Sehingga, jadilah masyarakat desa hutan sampai saat ini, memiliki potret wajah yang muram dan dengan masa depan yang suram pula.

Perum Perhutani pada tahun 2001 membuka kesempatan bagi masyarakat desa hutan untuk terlibat aktif dalam pengelolaan hutan, dengan mengembangkan Sistem Pengelolaan Hutan

Bersama Masyarakat (PHBM). Pemikiran yang mendasari PHBM adalah bahwa pembangunan sumberdaya hutan tidak saja berarti membangun hutan secara fisik, namun juga berarti membangun masyarakat desa hutan yang ada di dalam dan di sekitar hutan. Masyarakat desa hutan memiliki ketergantungan yang kuat terhadap hutan, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Hal ini berarti bahwa kualitas hutan tidak hanya ditentukan oleh masalah teknis kehutanan saja tetapi juga ditentukan oleh masalah yang terkait dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat desa hutan. Oleh karena itu sudah saatnya masyarakat didudukkan sebagai subyek dan obyek dalam pembangunan hutan. Perencanaan partisipatif atau perencanaan bersama yang dilakukan oleh semua pihak diharapkan dapat mewadahi aspirasi semua pihak, sehingga akan menimbulkan konsekuensi untuk berperan aktif dalam pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi dari pengelolaan hutan yang telah dilakukan.

Keterlibatan aktif ini dimulai dari terjalinnya kerjasama pengelolaan hutan antara Perhutani dengan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH). Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) adalah satu lembaga yang dibentuk oleh masyarakat desa yang berada didalam atau disekitar hutan untuk mengatur dan memenuhi kebutuhannya melalui interaksi terhadap hutan dalam konteks sosial, ekonomi, politik dan budaya. Pihak yang terlibat dalam proses pengembangan lembaga masyarakat desa hutan ini adalah: seluruh anggota dan pengurus dari LMDH, pemerintah daerah (desa sampai kabupaten), pihak yang terkait sesuai dengan kebutuhan (dinas/instansi terkait), pihak yang memiliki kepedulian terhadap pengembangan lembaga (investor, perguruan tinggi, LSM), dan fasilitator yang dapat dipilih dari masyarakat sendiri atau pihak luar.

Dalam sistem PHBM ini dilakukan proses pemberdayaan kepada masyarakat desa hutan yang bertujuan untuk mencapai pengelolaan sumberdaya hutan yang lestari dan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa hutan. Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan hutan ini dapat dimaknai sebagai proses untuk berbagi peran, berbagi ruang dan waktu, serta berbagi hasil. Dengan melibatkan masyarakat desa hutan dalam setiap tahapan pengelolaan hutan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi akan memberi makna yang dalam bagi mereka. Motivasi dan tanggung jawab bersama dalam pengelolaan hutan akan muncul dari proses-proses yang dilalui dalam pemberdayaan masyarakat.

Kajian jender semestinya bisa masuk untuk menyelaraskan program PHBM dengan konteks sosial budaya masyarakat desa-desa sekitar hutan. Oleh karena itu, kemampuan para pihak

terkait harus ditingkatkan untuk mendukung pelaksanaan PHBM yang bermanfaat dalam memberdayakan kaum wanitanya. Oleh karena itu perlu dirancang suatu panduan di tingkat lapangan yang dibuat atas dasar pengalaman pemberdayaan masyarakat desa hutan dengan memasukkan variabel jender sebagai salah satu indikator keberlanjutan sumberdaya hutan dalam sistem PHBM.

Dengan melibatkan kaum perempuan secara aktif dalam setiap tahapan pengelolaan hutan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi akan memberi makna yang dalam bagi mereka. Motivasi dan tanggung jawab bersama antara laki-laki dan perempuan dalam pengelolaan hutan akan muncul dari proses-proses yang dilalui dalam pemberdayaan masyarakat desa hutan. Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan hutan ini dapat dimaknai sebagai proses untuk berbagi peran, berbagi ruang dan waktu, serta berbagi hasil secara adil antara laki-laki dan perempuan sesuai dengan norma yang berlaku dalam sistem sosial ekonomi mereka.

PENUTUP

Berdasarkan hasil pembahasan pada bagian terdahulu, maka dapat disimpulkan beberapa hal penting, yaitu sebagai berikut.

1. Masyarakat (*community*) adalah sekumpulan orang yang mendiami suatu tempat tertentu, yang terikat dalam suatu norma, nilai dan kebiasaan yang disepakati bersama oleh kelompok yang bersangkutan. Berdasarkan pada tipologinya, masyarakat desa hutan adalah masyarakat yang mendiami wilayah yang berada di sekitar atau di dalam hutan dan mata pencaharian/pekerjaan masyarakatnya tergantung pada interaksi terhadap hutan. Sistem kehidupan pada masyarakat desa hutan pada mulanya sangat menyatu dengan hutan sebagai sub sistem sosial mereka, dengan pola pembagian kerja menurut jenis kelamin yang teratur.
2. Wanita berperan besar dalam konservasi sumberdaya hutan, yang merupakan sistem penyangga kehidupan (*life support system*) bagi seluruh ekosistem. Hal ini disebabkan karena mereka mempunyai intensitas hubungan yang sangat tinggi dengan hutan, dalam seluruh aktivitas kehidupan mereka, di mana hutan merupakan sumber kehidupannya. Oleh karena itu, mereka mampu mengelola hutan secara cermat dan hati-hati.

3. Setelah masuknya sistem Hak Pengusahaan Hutan (HPH), maka terjadi perubahan sistem sosial. Kerusakan hutan di dunia semakin tinggi telah membawa dampak buruk bagi kehidupan masyarakat desa hutan dan menyebabkan terjadinya marginalisasi peran sosial ekonomi. wanita yang ditandai dengan semakin tingginya entropi, berarti telah terjadi peningkatan ketidak-teraturan pola perilaku dalam sistem kehidupan sosial mereka.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, A. 1995. "Pembangunan Kehutanan yang Berkesinambungan dalam kaitannya dengan Aspek Ekonomi, Sosial dan Kultural" dalam *Agriculture-Short Course, Agriculture Planning Volume I*, Universitas Mataram, Lombok, Indonesia Australia Eastern Universities Project AIDAB
- Boserup, E. 1984. *Peranan Wanita dalam Perkembangan Ekonomi*. Jakarta; Yayasan Obor Indonesia.
- Budiman, A. 1983. *Pembagian Kerja Secara Seksual. Sebuah Pembahasan Sosiologis tentang Peran Wanita di dalam Masyarakat*. Jakarta; Penerbit PT Gramedia
- Braidotti, R, et al. 1994. *Women, the Environment and Sustainable Development. Towards a Theoretical Synthesis*. London; Zed Books in association with INSTRAW
- Dankelman, I, Joan Davidson. 1988. *Women and Environment in The Third Wold. Allince for The Future*. London; Earthscan
- Hardin, G. 1977. "The Tragedy of Common" dalam G. Hardin and John Baden (eds.), *Managing The Commons*, San Fransisco, WH Freeman and Co
- Mattulada, HA. 1994. *Lingkungan Hidup Manusia*. Jakarta; Pustaka Sinar Harapan
- Odum, Eugene P, 1996, *Dasar-Dasar Ekologi*. Edisi Ketiga, Tjahjono Samingan (Terjemahan), Yogyakarta, Gadjah Mada Univeristy Press
- Rambo, Terry (Editor), 1981, "Conceptual Approaches to Human Ecology: A Sourcebook on Alaternative Paradigms for The Study of Human Interactions with The Environment", EAPI Eorkshop on Human Ecology Research for Social Scientists.
- Shiva, V. 1994. *Dari Bio Imperialisme ke Bio Demokrasi*. Jakarta; PT. Gramedia
- 1993. Asian & Pasific Women's resource and Action Series: Environment